

Pembentukan Wacana Moderasi Beragama¹

Robert Setio, UKDW

Pendahuluan

Setidaknya sejak tahun 2019, wacana moderasi beragama banyak disampaikan di ruang publik. Wacana tersebut dapat dipahami sebagai respon terhadap meningkatnya kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Sejak tahun 2000an serangkaian tindakan terorisme atas nama agama dan konflik-konflik antar pemeluk agama yang berbeda mengalami peningkatan. Hal serupa juga terjadi di banyak negara lainnya sehingga kesan bahwa agama menjadi sumber persoalan dunia sulit untuk ditampik. Kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai kekerasan agama itu tidak saja berupa materi tetapi juga nyawa manusia. Oleh sebab itu dapat dimengerti jika muncul upaya-upaya untuk mengcounter kekerasan agama tersebut. Moderasi beragama yang pertama-tama digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah bentuk counter terhadap kekerasan agama. Wacana ini kemudian disambut dan disebarluaskan oleh berbagai organisasi keagamaan. Meskipun melibatkan masyarakat sipil, kesan bahwa wacana moderasi beragama ini merupakan program Pemerintah sulit untuk disangkal. Entah apakah Pemerintah ikut mendanai penyebaran wacana ini melalui berbagai kegiatan, antara lain penulisan buku, tetapi sejak penerbitan buku saku *Tanya Jawab Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama RI* di tahun 2019, telah diterbitkan berbagai buku dan artikel dengan tajuk yang sama (antara lain Muhtarom, Fuad, Latief 2020; Fajron & Tarihoran 2020; Munir, dkk. 2020; Akhmadi 2019; Jura 2020). Kesannya ada dana Pemerintah yang digelontorkan untuk penerbitan tulisan-tulisan tersebut. Kalau benar bahwa moderasi beragama ini proyek yang diatur oleh Pemerintah bukan berarti membuatnya menjadi buruk. Tetapi melihat apa yang dianjurkan dalam moderasi beragama itu, kesadaran diri dari masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan. Artinya, moderasi beragama tidak bisa dipaksakan dari luar, namun perlu datang dari kesadaran diri sendiri.

Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana wacana moderasi beragama dibentuk oleh berbagai tulisan antara lain oleh sebuah buku dari kalangan Kristen yang ditulis oleh Albertus M. Patty, *Moderasi Beragama, Suatu Kebajikan Moral-Etis* (2021). Buku ini menarik untuk didiskusikan oleh karena ditulis oleh seorang pendeta. Melihat penulisnya, orang berharap bahwa buku ini merupakan pesan bagi kalangan Kristen. Isi buku ini ikut memperkuat kesan tersebut karena di dalamnya terdapat argumentasi-

¹ Telah dipublikasikan dalam Julianus Mojau (ed.), *Bersama Sang Hidup* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 351-369.

argumentasi dan contoh-contoh yang khas Kristen. Sedangkan tulisan lain tentang moderasi beragama kebanyakan dikarang oleh penulis Muslim dan ditujukan kepada kalangan Muslim. Maka pertanyaan yang segera muncul ketika melihat buku karangan Patty tersebut adalah apakah yang perlu di-moderasi dari Kekristenan? Atau, pertanyaan yang lebih netral adalah apakah relevansi moderasi beragama bagi orang-orang Kristen? Sebelum membahas pertanyaan tersebut berikut ini akan terlebih dahulu diulas mengenai wacana lain yang sudah ada sebelum wacana moderasi beragama yaitu deradikalisasi. Kedua wacana ini memiliki kemiripan bahkan bisa dianggap sama. Tetapi sebenarnya akan lebih baik jika dari wacana deradikalisasi diambil pelajaran yang digunakan untuk memperbaiki wacana moderasi beragama. Pelajaran tersebut tidak lain adalah upaya untuk menepis radikalisme agama tidak dapat dilakukan dengan metode koersif atau imposisi.

Deradikalisasi

Pertama-tama perlu diakui bahwa istilah deradikalisasi telah menuai banyak kritikan. Istilah ini juga telah dipakai dengan berbagai pemaknaan. Kesimpang-siuran tersebut tidak lepas dari pengertian kata radikal. Sebagian memahami kata ini baik-baik saja. Mereka yang berpandangan begini memberi alasan bahwa radikal itu berasal dari kata *radix* dalam Bahasa Latin yang artinya akar atau asal. Jadi radikal itu adalah sikap yang mengakar. Bila diterapkan dalam agama, sikap radikal itu dapat dipahami dengan sikap yang taat, bersungguh-sungguh, tidak terombang-ambing. Bisa juga dipahami sebagai sebuah sikap yang berpegang pada kesejatan agama. Maka tidak ada yang negatif dari istilah radikal. Keberatan terhadap penggunaan istilah ini untuk dikenakan kepada kelompok tertentu yang dianggap menyalahgunakan agama datang dari pengertian radikal yang positif itu. Jika orang tidak boleh radikal maka justru akan membuat orang itu melenceng dari ajaran agama yang sebenarnya. Dengan kata lain, justru untuk mendorong agar orang tidak menyalahgunakan agama, sikap radikal diperlukan. Sementara itu, ada yang tidak setuju terhadap pengertian radikal yang positif itu. Alasannya, sikap radikal itu sama dengan membenarkan diri dan pandangan sendiri dan menganggap salah pihak yang berbeda. Sikap radikal sama dengan menutup mata terhadap kemungkinan lain. Sikap tersebut dalam ranah pergaulan sosial berdampak pada tindakan memusuhi mereka yang berbeda. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemeluk agama lain merupakan ekspresi radikalisme.

Terlepas dari perdebatan mengenai kata radikal tersebut, deradikalisasi telah banyak diterima sebagai nama untuk suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah segera sesudah pelaku teror dijatuhi hukuman penjara. Para pelaku teror yang telah ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman penjara atau yang biasa disebut dengan eks-kombatan itu adalah sasaran dari program-program deradikalisasi yang dibuat oleh

Pemerintah. Bentuk dari program-program tersebut ada yang edukatif seperti pembinaan tentang pemahaman keagamaan dan kebangsaan, ada juga yang berkenaan dengan ekonomi seperti memberikan pelatihan-pelatihan untuk menjalankan pekerjaan. Harapannya, setelah para eks kombatan tersebut keluar dari penjara, mereka siap untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Dalam kerangka yang sama, Pemerintah juga menjalankan program bagi keluarga eks kombatan terutama dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Upaya-upaya tersebut itulah yang disebut dengan deradikalisasi.

Di samping pengertian yang spesifik dari deradikalisasi itu, terdapat pula pengertian yang lebih umum. Dalam hal ini deradikalisasi dilihat sebagai upaya untuk menanamkan paham-paham keagamaan yang tidak radikal. Aktor yang melakukannya tidak terbatas pada orang-orang yang secara resmi diutus oleh Pemerintah, namun juga anggota masyarakat sendiri. Mereka bertugas untuk memberikan pembinaan, pengajaran, ceramah yang menjadi alternatif terhadap ajaran yang sifatnya radikal. Terkadang bentuk deradikalisasi ini disebut dengan pendekatan lunak atau pendekatan budaya. Jadi kalau di atas tadi disebut dengan pendekatan keamanan atau hukum, yang ini disebut dengan pendekatan yang informal atau budaya. Pendekatan ini lebih dimasukdikan sebagai upaya membangun kesadaran. Masyarakat diajak untuk menyadari bahwa agama ada untuk membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Meskipun sifatnya lunak, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya semacam ini juga tetap merupakan *counter* terhadap radikalisme. Maka, dalam arti ini deradikalisasi memiliki kesamaan dengan moderasi beragama. Keduanya dirancang sebagai *counter* terhadap paham dan pola beragama yang radikal.

Tetapi kemunculan wacana moderasi beragama sejak tahun 2019 itu seperti hendak menggeser deradikalisasi. Beberapa kemungkinan mengapa pergeseran itu dilakukan kalau memang benar demikian. Pertama adalah pada istilah radikal yang digunakan dalam deradikalisasi itu. Sebagaimana sudah disinggung di atas, istilah ini mengundang kontroversi. Ada kekhawatiran jika istilah ini digunakan maka sesuatu yang baik akan turut tercabut jika dilakukan *counter* terhadapnya. Lebih tegas lagi, ketaatan yang sungguh-sungguh pada agama sebagaimana tercermin dalam istilah radikal, akan dianggap negatif dan dijadikan sasaran deradikalisasi. Maka lebih baik memilih istilah lain yang dapat menghindarkan orang dari risiko buruk tersebut. Ibaratnya jangan sampai ketika hendak mencabut tanaman hama, tanaman yang berguna juga ikut tercabut. Kemungkinan kedua adalah kata radikal berasal dari luar tradisi agama yang dalam hal ini adalah Islam. Istilah moderasi beragama sering dijelaskan dalam kaitan dengan istilah *al-wasatiyyah* yang artinya kurang lebih jalan tengah. Penjelasan tentang *al-wasatiyyah* sebagaimana penggunaannya dalam tradisi Islam dapat membawa pada kedalaman makna (Muhtarom, Fuad, Latief 2020: 37;

Fajron & Tarihoran 2020: 20-26). Di sisi lain, istilah ini juga sekaligus meletakkan wacana moderasi beragama di dalam tradisi agama. Ini berbeda dengan penggunaan istilah deradikalisasi yang terkesan datang dari luar dan memerlukan penjelasan yang panjang - apalagi dengan adanya kontroversi tadi - jika digunakan dalam diskusi keagamaan. Kemungkinan ketiga mengapa moderasi beragama dipilih adalah karena deradikalisasi memberikan sinyal kuat akan adanya masalah keamanan dan hukum. Kalau begitu, deradikalisasi bukan datang dari dalam agama itu sendiri. Lebih bermasalah lagi jika ia datang dengan wajah yang koersif.

Kemungkinan ketiga tadi layak untuk dipertimbangkan tidak saja ketika orang menggunakan istilah deradikalisasi, namun juga istilah moderasi beragama. Karena sekalipun moderasi beragama berasal dari dalam agama itu sendiri, sifat koersif masih mungkin terjadi. Mengingat peran Pemerintah cukup besar dalam moderasi beragama maka keberhati-hatian terhadap kemungkinan sikap koersif itu perlu lebih ditingkatkan. Belajar dari pengalaman deradikalisasi, sesuatu yang dipaksakan (halus maupun terang-terangan) malah bisa menimbulkan penolakan bahkan kecurigaan (Sumpter 2017). Para eks kombatan menjadi resisten ketika terus menerus diceramahi. Informasinya, ketika mereka dijenguk oleh orang Pemerintah, mereka enggan untuk menemui. Kesuksesan program deradikalisasi memang ada, antara lain dengan berubahnya pemikiran eks kombatan tertentu yang kemudian menjadi penyebar paham yang berlawanan dengan paham radikal yang semula mereka pegang. Tetapi harus diakui bahwa masih cukup banyak eks kombatan yang tidak tertarik dengan gagasan-gagasan yang berbeda. Mereka ini tetap bergeming dengan pandangan mereka, bahkan ketika mereka sudah menyelesaikan masa tahanan mereka dan kembali ke masyarakat. Dari informasi yang didapat, resistensi tersebut tidak hanya disebabkan oleh cara-cara yang koersif untuk menobatkan mereka namun juga penolakan masyarakat terhadap mereka. Tidak sedikit eks kombatan yang ditolak kembali ke daerah asalnya. Keluarga merekapun juga semacam dikucilkan oleh masyarakat. Perlakuan masyarakat tersebut dapat dimaklumi, namun perlu juga dijadikan pelajaran. Cap buruk yang dikenakan kepada para pelaku teror tersebut ternyata sulit sekali untuk dicabut. Ibaratnya sekali teroris tetap teroris. Dari situ terlihat bahwa istilah dan penerapannya mempunyai dampak yang tidak dapat dianggap enteng.

Siapa yang harus dijadikan moderat?

Pertanyaan di atas sepintas terkesan biasa saja karena sudah selayaknya orang bertanya demikian kalau mendengar kata moderasi beragama. Moderasi beragama mengandaikan ada yang tidak moderat yang perlu dibuat moderat. Tetapi siapa mereka yang tidak moderat itu? Dari buku Patty dapat dicatat jawaban sebagai berikut:

- di halaman 3-5 disebutkan tentang tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan atas nama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Untuk yang Islam diberikan contoh peristiwa yang belum lama terjadi yaitu pengeboman gereja Katedral di Makassar (tahun 2021) dan pembunuhan terhadap orang Kristen serta perusakan gereja di Sigi (tahun 2020). Untuk yang pelakunya Kristen, diberikan contoh Kaisar Konstantin, penguasa Romawi yang menekan sekte seperti Donatis dan melakukan persekusi terhadap orang Yahudi. Kemudian peperangan antara Protestan dan Katolik di masa awal kelahiran gereja-gereja Protestan. Selain itu ada pula pembunuhan terhadap orang-orang Indian Amerika oleh para prajurit Spanyol karena orang-orang Indian itu menolak masuk Kristen. Untuk masa modern, Patty memberi contoh pengeboman sebuah klinik aborsi di Los Angeles. Tidak lupa, Patty menambahkan pengkotbah-pengkotbah fundamentalis yang membenarkan hegemoni Amerika Serikat atas negara-negara lain. Tentang pelaku Hindu, Patty menyebut sekilas tentang yang terjadi di India. Lalu yang Budha, diberi contoh pembantaian Muslim Rohingnya di Myanmar.

- di halaman 21-25, Patty mengutip pandangan Kimball tentang 5 ciri fundamentalisme-ekstrim. Pertama, absolutisme kebenaran diri atau kelompok sendiri. Kedua, ketaatan buta kepada pemimpin agamanya. Ketiga, terjebak dalam ilusi negara teokratis (negara agama). Keempat, menghalalkan segala cara. Kelima, anggapan bahwa sedang terjadi peperangan melawan kelaliman.

- di halaman 29, Patty menyebutkan polarisasi tentang arti Indonesia. Polarisasi itu terjadi antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Oleh kaum agamis "yang terpapar fundamentalisme dengan kecenderungan radikalisme-ekstrimisme, persoalan apa pun bisa menjadi pemicu kecurigaan antarumat beragama".

Dengan pemaparan seperti itu Patty tampak berusaha untuk mengidentifikasi siapa saja yang patut menjadi sasaran moderasi beragama. Tetapi tampak pula ada yang tidak mudah untuk diungkapkan dengan gamblang. Pertama, tidak mudah rupanya untuk mendapat contoh-contoh dari Indonesia sendiri tentang kekerasan yang dilakukan atas nama agama selain Islam. Contoh-contoh yang pelakunya Kristen diambil dari luar negeri. Bahkan beberapa sudah lama sekali terjadi. Menjadi pertanyaan, apakah memang orang Kristen Indonesia tidak pernah melakukan kekerasan dan pembunuhan seperti saudara-saudaranya yang Muslim? Persoalan ini sekaligus mengangkat keluhan-keluhan yang selama ini terdengar dari pihak Islam. Sejak 9/11, bom Bali dan seterusnya, potret yang diunggah ke ruang publik seringkali dianggap menyudutkan Islam. Islam digambarkan sebagai agama yang mendorong dan bahkan membenarkan kekerasan. Usaha untuk mengubah pandangan populer tersebut sudah dilakukan. Tidak saja oleh orang Islam sendiri, mereka yang bukan

Islam juga ikut berusaha meluruskan pandangan yang kurang baik tentang Islam itu. Buku Patty sendiri juga memperlihatkan usaha tersebut. Tetapi seperti yang terlihat pada penyampaian contoh di atas, ada kesan bahwa pelaku kekerasan atas nama agama, setidaknya di Indonesia, adalah orang-orang Islam saja. Kedua, memang Patty sudah berusaha seimbang (berarti mempraktekkan moderasi!) dengan cara menyebut orang-orang Kristen sebagai pelaku kekerasan. Bagi mereka yang paham tentang dinamika Kristen di Indonesia bisa menangkap pesan implisit yang diberikan oleh Patty yaitu fundamentalisme yang dalam contoh disebutkan pelakunya sebagai orang-orang Amerika Serikat itu, sebenarnya juga ada di Indonesia. Pengaruh fundamentalisme Amerika Serikat cukup kuat di Indonesia. Ciri-ciri yang dikutip Patty dari Kimball tadi bisa dikenali juga dari antara orang Kristen di Indonesia. Meskipun demikian, tetap agak sulit untuk menganggap fundamentalis Kristen di Indonesia telah melakukan kekerasan dan pembunuhan seperti orang Islam yang contohnya disebutkan tadi. Bukan berarti orang Kristen di Indonesia tidak pernah melakukan pembunuhan dan perusakan rumah ibadat agama lain, namun untuk mencari contoh dimana orang Kristen diam-diam mengebom rumah ibadat agama lain atau secara mengejutkan membunuh orang-orang yang beragama lain agaknya bukan sesuatu yang mudah. Setidaknya jika contoh itu dicari dari kurun waktu belakangan ini.

Dengan catatan seperti itu, tidak salah untuk melihat bahwa buku Patty itu bila dibaca oleh orang Kristen Indonesia justru akan melahirkan kesimpulan bahwa yang perlu dimoderasi itu bukan orang Kristen tapi orang yang lain, khususnya penganut Islam (Hefner 2018).

Kesadaran akan konteks

Seperti sudah disinggung di atas, wacana moderasi beragama telah dengan gencar dipromosikan oleh orang-orang Islam. Tadi sudah disebutkan tentang istilah *al-wasatiyyah* yang dikatakan sebagai asal mula istilah moderat dan moderasi yang dengan begitu membuat moderasi beragama sebagai bagian dari penerapan Islam. Dengan kata lain, dalam wacana moderasi beragama, ada tindakan-tindakan atau paham-paham tentang ke-Islam-an yang perlu dibuat menjadi moderat. Apakah itu? Tanpa mengecilkan arti aspek-aspek lainnya, ada sebuah aspek yang tampaknya sangat krusial mengenai apa yang dianggap tidak moderat dan bagaimana yang tidak moderat itu perlu dimoderatkan. Aspek itu adalah kesadaran akan konteks.

Di halaman 51, Patty menuliskan sebuah upaya dari Nahdlatul Ulama untuk mempromosikan Islam yang kontekstual yang disebut dengan istilah Islam Nusantara. Beberapa kutipan yang disebut Patty menjelaskan maksud dari Islam Nusantara itu. Kutipan-kutipan tersebut menggambarkan pentingnya Islam mengakar pada konteks budaya di mana ia berada. Dengan cara itu Islam dapat menyatu dengan kehidupan

para pemeluknya. Secara implisit diakui bahwa Islam datang dari luar Nusantara, namun dengan masuknya Islam ke dalam kebudayaan masyarakat di Nusantara maka hasilnya adalah Islam yang bercorak Nusantara. Pemahaman ini memberikan sinyal yang kuat bahwa Islam tidak menolak budaya setempat. Ini berbeda dengan pandangan beberapa kalangan Muslim yang justru menolak budaya setempat. Sebagai contoh, belum lama ini terjadi peristiwa yang menghebohkan dimana seorang relawan yang berniat menolong korban gunung meletus di Jawa Timur dengan sengaja menyingkirkan sesajen dari masyarakat setempat sambil mengatakan bahwa sesajen seperti itulah yang membuat Allah murka dan mengirimkan letusan gunung. Tindakan lelaki tersebut jelas memperlihatkan sikapnya yang anti budaya setempat. Tidak lama setelah itu muncul kontroversi lainnya yang sifatnya sejenis. Seorang ustaz menyatakan bahwa wayang itu haram. Kontan ceramahnya mengundang reaksi perlawanan dari para dalang. Peristiwa-peristiwa tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa kampanye Islam Nusantara yang digalakkan oleh NU itu dimaksudkan untuk mengcounter penyebaran pemahaman tentang Islam yang membuat kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri ditolak (tetapi Mietzner & Muhtadi 2020 memperlihatkan tindakan-tindakan intoleran oleh orang-orang NU).

Perlawanan terhadap paham yang membuat Islam tidak berakar pada kebudayaan setempat tersebut juga dikaitkan dengan isu kebhinekaan bangsa. Isu ini berhubungan erat dengan pilihan untuk menjadikan Indonesia bukan sebagai negara agama (Bagir: 2011: 121, 122; Shah 2017: 28). Pilihan para pendiri bangsa itu masih dipertahankan hingga sekarang meskipun berulang kali harus berhadapan dengan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (Hefner 2020, Shah 2017: 37-42). Upaya mempertahankan bentuk negara itu lahir dari kesadaran dan kerelaan untuk menerima bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas, namun keberadaan agama-agama lainnya tetap diterima dalam kebersamaan dengan Islam. Penerimaan itu diikat lewat ideologi Pancasila (Hoon 2017). Maka siapa yang mengingkari kebhinekaan bangsa akan dilihat sebagai orang yang tidak berpijak pada realita yang majemuk itu dan lebih jauh lagi dianggap telah menolak Pancasila. Patti sendiri berulang kali menggunakan kata realita dan realistik untuk menggambarkan keadaan bangsa yang sesungguhnya. Mereka yang tidak dapat menerima keragaman bangsa Indonesia adalah mereka yang tidak dapat menerima realita atau yang tidak realistik. Moderasi beragama ingin menjamin agar masyarakat menyadari realita bangsa yang majemuk itu dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk membangun kehidupan bersama. Konsekuensinya, mereka yang tidak sejalan dengan pandangan tersebut akan dilihat sebagai orang-orang yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan bahkan anti Pancasila.

Cap tidak nasionalis dan anti Pancasila itu sering dikenakan kepada mereka yang dianggap tidak moderat. Sehingga pada akhirnya moderasi beragama menjadi simbol dari nasionalisme dan pembelaan terhadap Pancasila. Dalam keadaan yang demikian, moderasi beragama menjadi semacam indoktrinasi ideologi. Tidak salah jika orang teringat masa-masa diberlakukannya penataran P4 di masa Orde Baru (Ropi 2017: 140-141). Waktu itu semua warga diwajibkan mengikuti penataran tersebut. Kelulusan mengikuti penataran tersebut menjadi syarat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Moderasi beragama memang tidak sampai sejauh itu. Programnya baru setingkat penyadaran. Mungkin juga tidak akan dibawa sampai ke tingkat seperti P4 dulu. Tetapi sebagai wacana ia juga berada dalam posisi yang cukup kuat untuk membuat pemilahan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Aspek-aspek dalam moderasi beragama

Jika boleh dibuat urutan berdasarkan besar kecilnya persepsi penilaian terhadapnya, berikut ini adalah aspek-aspek yang dipakai untuk membentuk wacana moderasi beragama:

1. *Aspek ideologi.* Dalam hal ini Pancasila adalah simbol dan tolok ukur untuk menilai seberapa jauh kemoderatan pemahaman dan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Pancasila juga berperan sebagai label. Bila disebut tidak sesuai bahkan anti Pancasila maka mereka yang disebut begitu sudah pasti tidak moderat. Sebagai tolok ukur, Pancasila dimengerti, dihayati, diresapi dan diamalkan maknanya oleh semua warga bangsa. Mereka yang tidak berhasil memahami, menghayati, meresapi dan mengamalkan Pancasila sudah pasti akan dinilai sebagai orang yang kurang atau tidak Pancasila. Konsekuensinya berat karena mereka yang demikian seakan-akan dikucilkan dari pergaulan luas antar warga bangsa. Moderasi beragama yang tampaknya terbatas hanya pada masalah-masalah keagamaan saja menjadi terkait dan terikat dengan masalah ideologi dan kebangsaan. Indonesia atau tidak Indonesia digunakan dalam wacana moderasi beragama untuk menilai kadar kemoderatan.

2. *Aspek budaya.* Sama seperti Pancasila, budaya juga dipahami dalam arti simbolik dan obyektif. Dalam tataran simbolik, ada yang disebut tidak berbudaya Indonesia atau tidak selaras dengan budaya Indonesia. Sudah lama bangsa Indonesia diajari untuk menilai budaya Barat sebagai budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kebebasan yang ditekankan dalam budaya Barat dianggap tidak seluruhnya tepat bagi bangsa Indonesia yang masih sangat menghargai perasaan. Kepada mereka yang lebih tua perlu diberi penghormatan dan tidak boleh diperlakukan setara dengan yang lebih muda. Dalam pergaulan, keramah-tamahan kepada tamu atau orang asing merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Jika yang sebaliknya yang terjadi yaitu tamu dicurigai dan asing disingkirkan maka tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan budaya

bangsa. Saat wacana moderasi beragama muncul, perbedaan budaya sendiri dan budaya luar itu beralih bukan antara Indonesia dan Barat melainkan antara Indonesia dan Arab sebagaimana sindiran KSAD belum lama ini. Eksplisit atau implisit suasana perbedaan tersebut dapat dirasakan. Masalahnya, lebih mudah jika Barat yang "diasingkan" ketimbang Arab atau Timur Tengah (istilah yang digunakan dalam kutipan yang digunakan oleh Patty). Bagi Islam, kedekatan dengan Arab tidak dapat dinafikan. Maka ketika Arab ditempatkan sebagai budaya yang tidak serta merta selaras dengan budaya Indonesia dapat dimaklumi jika banyak reaksi menolak atau kebingungan. Persoalan ini sangat sensitif sehingga tampaknya pilihan yang diambil adalah menekankan budaya Indonesia itu sendiri ketimbang langsung mengurus budaya Arab. Pilihan ini membuat penghargaan kepada kebudayaan daerah dimunculkan kembali atau terus menerus. Di Yogyakarta misalnya, Pemerintah Provinsi mengharuskan penggunaan nama-nama Jawa untuk pengistilahan kantor-kantor pemerintah seperti kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Sejalan dengan gerakan "kembali" ke kebudayaan setempat itu, perlu dicatat pula pemberian perhatian dan penghargaan kepada agama-agama pribumi (*indigenous religions*). Meskipun pengakuan kepada agama pribumi belum total, namun gerakan ke arah sana sudah dapat dirasakan. Kesadaran bahwa agama pribumi itu adalah agama dan bukan sekadar kepercayaan juga makin menguat. Tetapi bukan tanpa penentangan. Seperti contoh tentang lelaki yang menendang sesajen dan ustaz yang mengharamkan wayang di atas, pandangan yang merendahkan agama pribumi masih sangat kuat. Para pemeluknya masih sering dijadikan sasaran dakwah atau penginjilan dengan maksud agar mereka pindah ke Islam atau Kristen. Berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, para pemeluk agama pribumi masih menantikan saat dimana agama mereka tercatat secara resmi. Di luar kekurangan-kekurangan yang masih ada, agama pribumi saat ini telah masuk ke dalam wacana moderasi beragama meskipun dalam tingkat yang masih awal.

3. *Aspek sosial*. Dalam banyak hal, wacana moderasi beragama ditempatkan sebagai isu pergaulan sosial. Di buku Patty halaman 46-49 dicatat tentang keberatan terhadap moderasi beragama yang intinya adalah agama akan menjadi kabur. Kekhawatiran tersebut dibantah dengan mengatakan bahwa ketaatan beragama tidak akan dikompromikan. Moderasi beragama tidak akan membuat ketaatan total pada ajaran agama menjadi luluh. Moderasi tidak sama dengan cair atau suam-suam kuku (istilah Patty yang diambil dari Alkitab). Dengan kata lain, moderasi beragama bukan soal ajaran pokok atau akidah dari agama melainkan bagaimana membawa agama ke tataran publik atau pergaulan sosial. Itulah sebabnya Patty menggunakan istilah kebajikan dan moral-etis. Bayangannya adalah pertemuan-pertemuan antar warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun tampaknya praktis, namun yang

dimaksudkan adalah bukan sekadar etiket pergaulan melainkan lebih dalam daripada itu yaitu kesadaran etis. Kadang-kadang dibuat pembedaan yang jelas antara dogma dan etika. Tetapi pembedaan seperti itu problematis. Bagaimana bisa dogma dipisahkan dari etika? Jadi walaupun yang dikehendaki adalah penataan hidup bersama, dogma yang sifatnya pokok juga ikut kena. Dogma punya kaitan erat dengan etika meskipun urutannya tidak harus dibuat dogma dulu baru etika.

Setidaknya, wacana moderasi beragama yang ada sekarang ini berbicara banyak tentang pergaulan sosial. Dalam buku *Tanya Jawab Moderasi Beragama* dari Kementerian Agama malah diberikan contoh-contoh berupa gambar yang memperlihatkan sisi etiket seperti sembahyang di tengah jalan. Pesannya, jika beribadah perlu mempertimbangkan kepentingan orang lain, maka ibadah di jalanan itu tidak sepatutnya dilakukan. Mungkin bagi orang tertentu persoalan seperti itu tidak sekadar persoalan etiket atau pergaulan sosial, namun menyangkut prinsip karena berkenaan dengan ibadah. Tetapi dari buku tersebut yang dipersoalkan bukan ibadahnya namun tempatnya yang merupakan fasilitas umum. Di situ, moderasi beragama ingin memberikan pengertian menjaga hubungan baik dan kepentingan bersama itu satu hal sedangkan menjaga prinsip-prinsip agama adalah hal lainnya. Keduanya tidak perlu dicampuradukan.

4. *Aspek agama*. Sepintas mengherankan jika aspek agama justru ditempatkan di posisi keempat dan bukan yang pertama dalam wacana moderasi beragama. Tetapi ada alasan untuk itu. Dalam persoalan moderasi beragama, justru agama yang disorot oleh karena masalahnya ada di situ. Moderasi beragama mengandaikan adanya permasalahan dalam diri agama itu sendiri. Entah hendak disebut dengan nama radikal, ekstrim, fundamentalis, atau lainnya kalau ada, istilah-istilah itu memperlihatkan ada sesuatu yang salah dengan agama. Pengakuan bahwa agama itu sendiri yang bermasalah jarang terjadi. Seringkali orang menutup-nutupi permasalahan yang ada dalam diri agama itu sendiri. Sering dikatakan bahwa kalau ada kekerasan atau tindakan teror atas nama agama maka sumbernya bukan agama itu sendiri melainkan politik atau ekonomi atau sebab lainnya. Lalu dijelaskan bahwa agama tidak pernah mengajarkan yang buruk-buruk. Sesuatu yang buruk pasti datang dari luar agama. Argumen serupa itu juga diberikan bahkan ketika ada agama yang secara gamblang dijadikan alasan untuk menyerang orang lain yang tidak seagama atau bahkan merusak dan membunuh. Dalam peristiwa seperti itupun masih sering para pejabat atau pimpinan agama berseru di depan publik bahwa tindakan tersebut bukan tindakan agama dan agama tidak dapat menyetujui tindakan tersebut. Kutukan juga terkadang dilontarkan terhadap tindakan semacam itu. Di sisi lain, upaya pembelaan terhadap agama itu terlihat justru membingungkan oleh karena simbol dan jargon agama terlalu kentara untuk disembunyikan. Daripada membuat apologia yang

tampaknya sia-sia, pilihan yang lebih baik adalah mengakui saja bahwa agama dapat mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Sudah pasti alasannya mulia, namun yang keluar adalah tindakan yang destruktif. Bagaimanapun, tanpa disebut secara terbuka, moderasi beragama ini adalah sinyal adanya pengakuan bahwa agama memang perlu diurusi. Agama bisa buruk dan karena itu perlu dilakukan sesuatu terhadapnya yang dalam hal ini dimoderasi.

Tetapi sebagaimana yang terbaca dari buku Patty, agama juga punya andil dalam memoderasi dirinya sendiri. Artinya, ada hal-hal yang dapat digunakan dan dikembangkan dari dalam diri agama itu sendiri untuk membuat sisi-sisi buruk yang juga ada dalam dirinya dapat tertanggulangi. Ini seperti mengatakan bahwa agama dapat mengatasi keburukan dirinya sendiri. Masuk akal juga jika berpikir seperti itu. Dalam hubungan dengan itu, Patty memberikan apa yang disebutnya dengan refleksi teologis. Posisi ulasan ini adalah di bagian akhir bukunya atau menjadi semacam penutup. Jadi jika buku itu diawali dengan permasalahan seperti ekstrimisme dan fundamentalisme (Patty agak enggan memakai istilah radikalisme) agama, di bagian akhir dituliskan tentang aspek-aspek yang sebaliknya. Sebelum bagian refleksi teologis itu, Patty menyebutkan secara cepat beberapa kontribusi agama, khususnya Islam dan Kristen bagi upaya moderasi beragama. Bagian-bagian ini secara keseluruhan hendak mengatakan bahwa agama juga punya potensi yang dapat digunakan untuk memoderasi dirinya.

Dengan tetap menghargai upaya-upaya untuk menggali dari dalam diri agama sendiri pemikiran-pemikiran yang moderat dan yang memungkinkan ekstremisme atau apapun istilahnya dapat ditepis, pada akhirnya harus dikatakan bahwa agama tidak dapat berdiri sendiri. Lebih jelas lagi: agama tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Agama memerlukan keterlibatan aspek-aspek lain di luar dirinya untuk menghadapi ekstrimisme yang harus diakui juga sebagai potensi yang ada dalam dirinya. Boleh-boleh saja orang membantah potensi buruk dari dalam diri agama dan mengatakan bahwa itu adalah soal penafsiran belaka. Jadi kalau ada yang buruk maka soalnya adalah penafsiran. Kalau ada yang baik, itu baru dari agama itu sendiri. Meskipun dikatakan begitu, namun agama tetap membutuhkan sesuatu dari luar dirinya, minimal untuk membuat penafsiran yang salah itu tidak terjadi. Lalu apa sesuatu yang dari luar agama itu? Dalam kesempatan ini, cukup disebutkan aspek kesatu sampai ketiga di atas. Dalam diskusi yang lain pernah juga diangkat hak-hak azasi manusia (HAM) sebagai teman atau patokan atau apapun yang perlu dipakai oleh agama untuk menepis hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini. Para agamawan cenderung sensitif jika dikatakan agama memerlukan HAM dan buru-buru mengatakan bahwa gagasan-gagasan HAM itu juga ada dalam agama, bahkan berasal dari agama. Tidak masalah jika hendak bersikap defensif seperti itu, namun tetap saja

agama perlu mendengar suara dari luar dirinya. Entah mau dikatakan bahwa suara itu sama dengan yang ada dalam dirinya atau itu suara yang berbeda dari yang selama ini didengar dari dalam dirinya sendiri, agama tetap berada dalam posisi pendengar. Ketika agama begitu kuat diyakini dan merasa berada di atas angin, kesediaan untuk menjadi pendengar suara dari luar itu seringkali sulit dilakukan. Tidak ada istilah lain untuk menamakan fenomena ini selain kesombongan. Pesannya lalu menjadi agar agama tidak menjadi sombong. Ironis tetapi perlu dipikirkan.

Masalah yang belum terungkap

Wacana moderasi beragama yang diangkat oleh Patty dalam bukunya dan sebagaimana diangkat dalam tulisan-tulisan lainnya juga hampir tidak pernah, kalau ada, menyentuh persoalan-persoalan yang berhubungan erat dengan ekstrimisme agama yaitu kesenjangan ekonomi dan korupsi (Piotrowski & Ingrams 2016). Mengingat keterbatasan tempat, tulisan ini tidak akan menguraikan persoalan-persoalan tersebut secara terinci, cukup untuk memperlihatkan bahwa tanpa mengangkat masalah-masalah itu, moderasi beragama menjadi timpang. Tetapi dengan mengangkat persoalan-persoalan itu, bukan berarti pula membuat agama dapat mencuci tangan terhadap masalah ekstrimisme atau fundamentalisme. Maka yang paling baik adalah melihat bagaimana wacana ekstrimisme atau fundamentalisme agama dibentuk dengan memasukkan persepsi tentang kondisi sosial yang carut marut.

Agama pada dasarnya berdalih untuk memperbaiki keadaan. Maka yang tertanam dalam dirinya adalah bayangan tentang keadaan yang buruk yang perlu diperbaiki. Dalam bahasa teologis keadaan yang buruk tersebut digambarkan sebagai *chaos* yaitu kekacauan total yang meliputi seluruh kehidupan. Anggapan bahwa dunia berada dalam keadaan *chaos* kemudian dikaitkan dengan pemahaman apokaliptik yang mendorong respon terhadap keadaan tersebut. Responnya dapat berupa tindakan yang pasif yaitu menantikan intervensi ilahi, atau yang aktif yaitu melakukan peperangan melawan penyebab *chaos*. Penyebabnya sendiri bisa banyak, namun dalam paham apokaliptik atau yang secara populer disebut akhir zaman, ada penyebab yang paling besar yaitu penguasa yang kekuasaannya sangat dominan. Dari situ kemudian diidentifikasi siapa penguasa itu. Dalam identifikasi itu digunakan analisis sosial dan ekonomi untuk menemukan siapa penguasa yang besar itu. Bisa saja kesimpulannya menjadi Amerika Serikat atau China jika konteksnya sekarang ini. Di masa lalu bisa imperium Romawi, Helenis, Persia, Babilonia, Mesir dan seterusnya. Atau di masa perang dingin antara blok Barat dan Komunis, yang sering disebut sebagai penguasa lalim adalah Sovyet atau China. Negara-negara adidaya itu benar-benar eksis dan alasan-alasan untuk menunjuk mereka sebagai sumber kekacauan bukan sama sekali khayalan. Tetap ada penggunaan data lapangan, pembuktian analitis dengan memakai ilmu sosial, politik, ekonomi yang adalah ilmu-ilmu sekuler. Maka sekalipun akhirnya

bermuara pada penilaian agama dan melahirkan tindakan-tindakan yang diinspirasi oleh penilaian agama itu, yang terjadi adalah agama dan soal-soal kemanusiaan menjadi satu, saling terhubung dan mempengaruhi lalu akhirnya membentuk sebuah wacana yang ekstrim atau fundamentalis atau radikal.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan moderasi beragama, sangat perlu untuk memeriksa aspek-aspek non agama seperti ekonomi dan sosial. Sisi-sisi itu yang sepertinya luput dari wacana moderasi beragama. Tanpa kehadiran aspek-aspek itu moderasi beragama justru akan menjadi bumerang. Salah satu yang bisa memukul balik moderasi beragama adalah bahwa gerakan ini sebenarnya hanya ingin menutup-nutupi kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sementara korupsi masih merajalela, penguasaan ekonomi dari segelintir orang atas sekian banyak orang lainnya masih terjadi, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih jauh dari merata, mengapa bukan itu yang dihadapi dengan sekuat tenaga, namun justru ekstrimisme agama? Besarnya dana untuk moderasi beragama dan deradikalisasi atau pencegahan terorisme agama seharusnya diimbangi dengan besarnya dana untuk menanggulangi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi tadi. Kalaupun bukan soal dana, soal perhatian juga perlu seimbang atau malah lebih besar ditujukan kepada masalah-masalah yang sangat dirasakan dalam hidup sehari-hari.

Tidak boleh dilupakan, agama dibangun di atas dasar pemahaman profetis yaitu perlunya perubahan total agar masyarakat dibebaskan dari penindasan penguasa lalim. Ekspresinya bisa beragam namun dasar berpijaknya sama seperti itu. Maka, kalau boleh lugas mengatakan: jangan beri kesempatan bagi agama untuk membesarkan semangat perlawanan dengan membiarkan penindasan kepada rakyat merajalela. Berhadapan dengan ekstrimisme agama, yang perlu, bahkan lebih perlu dilakukan adalah membenahi kondisi sosial yang ada. Bila korupsi masih terus menerus terjadi dan bila ketimpangan ekonomi masih belum ditangani dengan sungguh-sungguh maka akan selalu ada alasan bagi lahirnya ekstrimisme agama. Dengan mengatakan itu, bukan berarti potensi ekstrimisme dari dalam diri agama sendiri ditampik. Tadi sudah dijelaskan soal itu. Tetapi yang dimaksud adalah kondisi sosial yang carut marut pasti akan melahirkan respon agama yang antara lain berupa ekstrimisme tadi. Sebenarnya istilah ekstrimisme itu juga kurang tepat jika yang dipertimbangkan adalah respon agama. Seperti yang tadi sudah disinggung, agama terpanggil untuk membenahi keadaan yang tidak baik. Panggilan itu sendiri adalah panggilan yang mulia. Tidak ada yang jelek dengan panggilan tersebut dan bahkan sudah seharusnya begitu. Kalau panggilan itu membuahkan respon yang ekstrim, sebenarnya tidak boleh dikatakan sebagai respon yang berlebihan jika memang kondisi yang direspon memang ekstrim. Melihat kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sulit untuk menghindarkan kesan ekstrim itu. Bagaimana tidak ekstrim jika korupsi tetap saja dilakukan meskipun

teriakan untuk menghentikannya sudah sangat kencang dan tidak sedikit dari pelakunya yang dijatuhi hukuman dan dipermalukan di depan umum. Dalam bahasa hukum pun, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah disebut dengan kejahatan luar biasa. Jadi jelas sekali jika korupsi di Indonesia sudah berada di tahap yang ekstrim atau malah sangat ekstrim. Sayangnya, istilah ekstrim hanya dikenakan kepada agama dan tidak pernah dikenakan kepada korupsi. Demikian juga dengan ketimpangan ekonomi yang dampaknya ke mana-mana itu. Ketimpangan ini juga harus dikatakan ekstrim. Bagaimana tidak ekstrim jika secara kasat mata saja orang sudah langsung bisa melihat gedung-gedung yang megah berdiri berdampingan dengan rumah-rumah yang berdempet-dempetan dan tampak kumuh. Sebuah pemandangan yang sering dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Juga bagaimana tidak dikatakan ekstrim jika ada orang yang memiliki sekian banyak rumah, tanah, mobil dan uang sedangkan lainnya harus hidup dengan bergantung pada belas kasihan orang lain. Masih agak baik jika yang terakhir ini jumlahnya sedikit, tapi tidak demikian yang terjadi di Indonesia. Jumlah orang miskin masih sangat banyak, sementara segelintir orang hidup dalam kemewahan yang tiada tara.

Kesimpulan

Moderasi beragama yang digalakkan sejak tahun 2019 berada dalam konteks meningkatkannya ekstrimisme atau radikalisme atau fundamentalisme agama. Melihat memburuknya kondisi keberagamaan di Indonesia, program moderasi beragama yang dijalankan terutama oleh Kementerian Agama RI dan diikuti oleh berbagai organisasi keagamaan dan para agamawan sangat dapat dimaklumi. Tulisan ini mengulas bagaimana wacana moderasi beragama dibentuk yaitu dengan mengaitkan agama dengan ideologi, budaya, pergaulan sosial dan dengan teologi. Dari wacana tersebut tampak bahwa moderasi beragama dimengerti sebagai agama yang bersesuaian dengan ideologi Pancasila, kebudayaan asli Indonesia, kebhinekaan bangsa dan teologi yang menerima kepelbagaian. Bersamaan dengan itu ada yang kurang diangkat atau terlupakan dalam wacana tersebut yaitu kondisi sosial yang carut marut sebagai akibat berlanjutnya korupsi dan ketimpangan ekonomi dengan segala dampaknya. Padahal ekstrimisme agama adalah respon terhadap kondisi sosial yang buruk tersebut. Jika ekstrimisme agama dilepaskan dalam kondisi sosial yang buruk itu maka pasti akan terlihat sebagai persoalan yang melulu agama. Tetapi jika dilihat dengan utuh, maka sebenarnya ekstrimisme agama itu adalah reaksi terhadap keadaan yang juga ekstrim. Korupsi yang merajalela dan ketimpangan ekonomi yang membuat miris harus dikatakan sebagai kondisi yang ekstrim. Mungkin dalam kelanjutan wacana moderasi beragama keberadaan masalah sosial yang ekstrim tersebut dapat lebih diperhatikan.

Kepustakaan

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 45-55.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. 2011. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan dan CRCS.
- Fajron, Akhmad & Naf'an Tarihoran. 2020. *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Batani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah di Wilayah Banten)*. Serang: Media Madani.
- Hefner, Robert. W. 2018. "Christians and Multireligious Citizenship in Muslim Indonesia". In D. Philpott and T.S. Shah (Editors), *Under Caesar's Sword. How Christians Respond to Persecution*. Cambridge: Cambridge U.P. 358-390.
- Hoon, Chang-Yau. 2017. "Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia". *Asian Studies Review*, Vol. 41, No. 3, 476-493.
- Jura, Demy. 2020. "Peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam Semangat Moderasi Beragama Demi NKRI". *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 13, No. 3, 315-323.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mietzner, Marcus & Burhanuddin Muhtadi. 2020. "The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and Politics of Religious Tolerance. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 42, No. 1, 58-84.
- Muhtarom, Ali, Sahful Fuad, Tsabit Latief. 2020. *Moderasi Beragama. Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*. Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara.
- Munir, Abdullah, et al. 2020. *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Patty, Albertus M. 2021. *Moderasi Beragama, Suatu Kebajikan Moral-Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Piotrowski, S.J., A. Ingrams. 2016. "Linking Corruption with Institutional Failure, Terrorism, and Religious Extremism", *Public Administration Review*, Vol. 76, Iss. 2, 360-363.

Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Palgrave Macmillan

Shah, Dian A.H. 2017. *Constitutions, Religion and Politics in Asia. Indonesia, Malaysia and Sri Lanka*. Cambridge: Cambridge U.P.

Sumpter, Cameron. 2017. "Countering Violent Extremism in Indonesia: Priorities, Practice, and the Role of Civil Society", *Journal of Deradicalization*, No. 11, 112-146.

